

**IMPLEMENTASI *CORPORATE GOVERNANCE* DALAM
MENINGKATKAN *VOLUNTARY DISCLOSURE*
(STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR
BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2021)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sebagian
persyaratan mencapai derajat Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi



Disusun oleh :

Natasha Amalia Sofiana

NIM.31401800236

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2025

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI *CORPORATE GOVERNANCE* DALAM
MENINGKATKAN *VOLUNTARY DISCLOSURE*
(STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR
BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2021)**

Disusun Oleh :

Natasha Amalia Sofiana

NIM.31401800236

Telah diuji dan dinyatakan lulus pada tanggal : 28 April 2025

Semarang, 28 April 2025

Pembimbing



Dr. Dista Amalia Arifah,SE.,M.Si,Akt,CA

NIK. 211406020

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

**IMPLEMENTASI *CORPORATE GOVERNANCE* DALAM
MENINGKATKAN *VOLUNTARY DISCLOSURE*
(STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR
BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2021)**

Disusun Oleh :

Natasha Amalia Sofiana

NIM.31401800236

Telah diuji dan dinyatakan lulus pada tanggal : 28 April 2025

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

Penguji I

Dr. Dista



.Si.,Akt.,CA

Hani Werdi Apriyanti, S.E., M.Si., Ak., CA

NIK. 210403051

Penguji II



Drs. Osmad Muthaher, M.Si., Akt., AWP Svariah, CSFT

NIK. 210403050

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Natasha Amalia Sofiana
NIM : 31401800236
Jurusan : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Menyatakan bahwa penelitian skripsi dengan judul “**IMPLEMENTASI CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN VOLUNTARY DISCLOSURE (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2021)**” benar benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 April 2025

Pemberi Pernyataan



Natasha Amalia Sofiana
NIM.31401800236

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi *Corporate Governance* Dalam Meningkatkan *Voluntary Disclosure* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021)” dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh derajat Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Shalawat serta salam senantiasa peneliti curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat dan telah membawa umat manusia dari kehidupan yang gelap menuju kehidupan yang terang benderang.

Peneliti sadar bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. Heru Sulistiyo, SE, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., MSi., AK., CA selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Dista Amalia Arifah S.E., M.Si., Akt., CA selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan selalu sabar memberikan arahan, pengetahuan serta motivasi sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Seluruh dosen dan staff karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan Skripsi ini.
5. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mashuri dan Ibu Istiqomah serta adik saya yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa untuk mengerjakan Skripsi ini hingga selesai
6. Teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung yang selalu memberikan semangat dan kebersamaannya dalam proses penyusunan tugas akhir.
7. Semua pihak lain yang telah membantu menyelesaikan Skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan yang telah diberikan

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan yang dimiliki peneliti. Peneliti mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih sempurna. Penulis juga berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 25 April 2024

Peneliti,

Natasha Amalia Sofiana

NIM.31401800236

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Perumusan masalah.....	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	5
2.1 Landasan Teori.....	5
2.1.1 Teori Agensi.....	5
2.1.2 Voluntary Disclosure	6
2.1.3 Corporate Governance	8
2.1.4 Kepemilikan Publik.....	9
2.1.5 Dewan Komisaris	10
2.1.6 Komisaris Independen.....	10
2.1.7 Komite Audit.....	11
2.1.8 Profitabilitas Perusahaan.....	11
2.2 Penelitian Terdahulu	11
2.3 Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran	16
2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Peningkatan Pengungkapan Sukarela.....	16
2.3.2 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Peningkatan Voluntary Disclosure	16
2.3.3 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Peningkatan Pengungkapan Sukarela.....	17
2.3.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Peningkatan Voluntary Disclosure ..	17
2.3.5 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Peningkatan Voluntary Disclosure....	18
2.4 Kerangka Penelitian	19
BAB III METODE PENELITIAN	21

3.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2 Populasi dan Sampel	21
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	21
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	22
3.5 Variabel dan Indikator.....	22
3.5.1 Variabel Terikat (Voluntary Disclosure)	22
3.5.2 Variabel Bebas (Corporate Governance)	23
3.6 Teknik Analisis	25
3.6.1 Statistik Deskriptif	25
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	25
3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda	27
3.6.4 Pengujian Hipotesis.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1 Gambaran Umum Obyek atau Subyek Penelitian.....	29
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	29
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	32
4.3.1 Uji Normalitas.....	32
4.3.2 Uji Multikolinearitas	34
4.3.3 Uji Heterokedastisitas	35
4.3.4 Uji Autokorelasi.....	36
4.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	37
4.5 Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)	38
4.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	39
4.5.2 Uji Statistik t.....	39
4.5.3 Pembahasan (Interpretasi).....	41
BAB V PENUTUP.....	45
5.1 Kesimpulan	45
5.2 Implikasi.....	46
5.3 Saran.....	46
5.4 Keterbatasan Penelitian.....	46
DAFTAR PUSTAKA	48
DAFTAR LAMPIRAN	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2.2 Lanjutan Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2.3 Lanjutan Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2.4 Lanjutan Penelitian Terdahulu	15
Tabel 4.1 Seleksi Pemilihan Sampel	29
Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	30
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas	34
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	34
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	36
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi setelah transformasi	36
Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	37
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi	39
Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	40



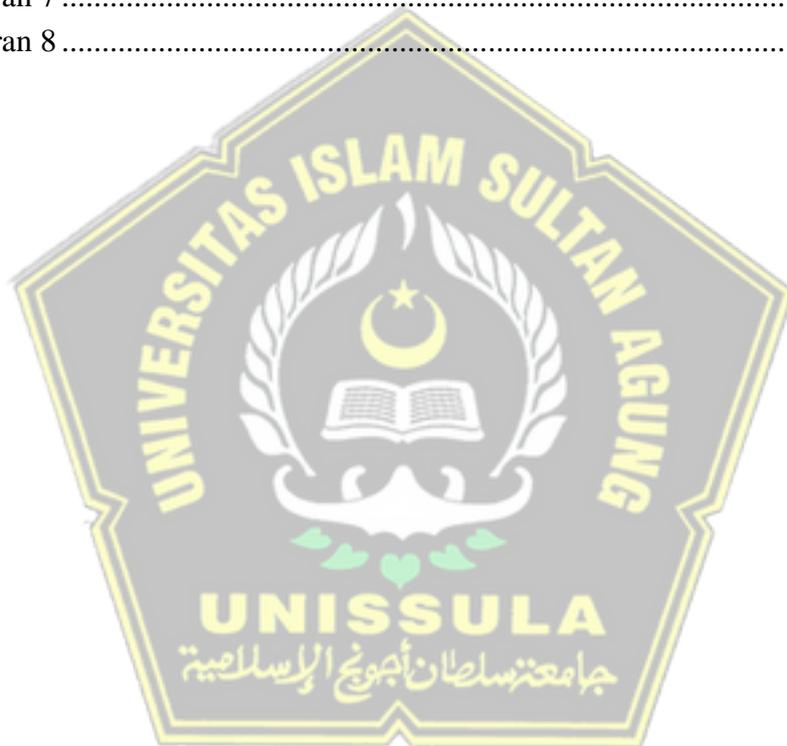
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4.....	20
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas.....	33
Gambar 4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	58
Lampiran 2	59
Lampiran 3	60
Lampiran 4	61
Lampiran 5	62
Lampiran 6	63
Lampiran 7	64
Lampiran 8	65



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkembangan sebuah Perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang diberikan setiap tahunnya melalui *annual report*. Laporan keuangan ini berisi informasi penting bagi pemangku kepentingan untuk mengetahui kondisi keuangan dan kinerja Perusahaan. Pada pertengahan tahun 2021, Bursa Efek Indonesia (BEI) dikejutkan oleh adanya dugaan manipulasi laporan keuangan tahunan (LKT) tahun 2019 yang menerpa salah satu emiten di bidang jasa dan perdagangan di bidang teknologi informasi, PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY) dan anak usahanya (CNBC Indonesia, 26 July 2021). *Corporate governance* merupakan seperangkat aturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya. Perusahaan yang menerapkan *corporate governance* akan menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya (Birawanto, M. F., 2019). Kurangnya keterbukaan informasi dan lemahnya sistem manajemen perusahaan dapat mengancam kebangkrutan Perusahaan yang mana fenomena ini bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia bisnis. Ancaman kegagalan perusahaan ini telah memaksa komite dan organisasi tata kelola perusahaan di seluruh dunia, untuk memberikan informasi dalam jumlah besar laporan dan merumuskan aturan yang membantu memantau dan mengawasi sistem manajemen perusahaan (Al- Janadi *et al.*, 2013). Informasi ini dapat dituangkan dalam pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Terdapat 2 jenis pengungkapan (*disclosure*), pengungkapan wajib (*mandatory*) dan pengungkapan sukarela.

Pengungkapan wajib adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh Lembaga berwenang. Sedangkan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) adalah pengungkapan yang dilakukan sukarela oleh Perusahaan tanpa diharuskan oleh Lembaga berwenang (Neliana, T, 2018). Menurut Wiguna (2013), investor merasa bahwa pengungkapan wajib dianggap kurang mencukupi sebagai bahan pembuat keputusan. Oleh karena itu *voluntary disclosure* diperlukan untuk menambah informasi dan kepercayaan investor. *Voluntary disclosure* juga dapat sebagai alat pembeda dalam menghadapi persaingan antar Perusahaan (Rafifah & Ratmono, 2015). Untuk mewujudkan *voluntary disclosure* yang memadai untuk kepentingan pemegang saham dan perusahaan, peran manajemen sangat penting karena *voluntary disclosure* dalam laporan tahunan diungkapkan oleh akuntan perusahaan dengan persetujuan

manajemen puncak perusahaan. Jika suatu perusahaan memiliki sistem *Corporate Governance* yang baik, maka kualitas pengungkapan sukarela perusahaan menjadi lebih baik.

Manfaat penerapan CG bagi perusahaan adalah meningkatkan kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya pada perusahaan, mempengaruhi keterbukaan informasi perusahaan kepada pengguna laporan keuangan, dan mengurangi asimetri informasi. Sistem ini diperlukan agar perusahaan dapat melanjutkan kegiatannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan rincian tersebut maka peran *Good Corporate Governance* dalam pengungkapan sukarela menjadi sangat penting. Sehingga perusahaan-perusahaan di Indonesia berlomba-lomba menerapkan mekanisme *Good Corporate Governance* untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan melalui pengungkapan dalam laporan keuangan, khususnya *voluntary disclosure*.

Penelitian yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *voluntary disclosure* telah banyak dilakukan. Misalnya Fatmawati *et al.*, (2018) dan Birawanto (2019) mengungkapkan bahwa kepemilikan public, dewan komisaris, komisaris independen dan komite audit memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Saraswati, E., Azzahra, A., & Sagitaputri, A. (2020) menyebutkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh pada *voluntary disclosure* sedangkan Birawanto (2019) menyebutkan sebaliknya.

Pentingnya pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan, dapat membantu investor melihat nilai tambah dan transparansi perusahaan ketika mengungkapkan hal-hal selain pengungkapan wajib. Perusahaan dengan transparansi yang kurang akan mengakibatkan terjadinya *information asymmetry* antara manajer menjadi agen dan pemilik sebagai pemegang saham/investor. Di hadapan pemangku kepentingan, perusahaan akan secara sukarela mengungkapkan informasinya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dijalankan oleh Fatmawati *et al.*, (2018) yang menemukan bahwa kepemilikan publik berdampak positif terhadap luas *voluntary disclosure*. Namun penelitian lain tidak sependapat dengan hasil tersebut, Wardani (2012) mengungkapkan kepemilikan publik tidak berdampak terhadap luas *voluntary disclosure*. Tetapi penelitian lain tidak sependapat dengan hasil tersebut, Poluan & Nugroho (2015) yang menyatakan bahwa komite audit berdampak negatif terhadap luas *voluntary disclosure*.

Penelitian ini mengembangkan pada penelitian sebelumnya yakni Fatmawati *et al.*, (2018) yang melakukan penelitian mengenai peran *corporate governance* dalam meningkatkan *voluntary disclosure*. Penelitian Fatmawati *et al.*, (2018) menggunakan data *annual report*, perusahaan sektor pertambangan yang termasuk di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-

2016. Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah periode penelitian yang dilakukan, karena dengan menggunakan periode yang berbeda (2018-2021) yang dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan menambahkan satu variabel kontrol berupa profitabilitas. Shinghvi dan Desai (1971) menyatakan bahwa tingkat profitabilitas merupakan rentabilitas ekonomi dan profit margin yang tinggi akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang lebih rinci, sebab mereka ingin menyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaan dan mendorong kompensasi terhadap manajemen. Penelitian yang dilakukan oleh Priguno, A., & Hadiprajitno, P. B. (2013), menemukan bukti bahwa Tingkat profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela pada laporan tahunan keuangan pada perusahaan. Selanjutnya, Pramesti, L. D. I., & Lahaya, I. A. (2016) menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *voluntary disclosure*. Hasil penelitiannya sejalan dengan penelitian Sudarmadji dan Sularto (2007), dan Trisanti (2012). Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan yang meyakini bahwa manajer dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan mengungkapkan informasi yang ekstensif. Profitabilitas yang tinggi membuat manajer ingin menunjukkan kepada pemegang saham bahwa mereka telah bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Selain itu, manajer pun ingin memberikan sinyal positif kepada publik atas kinerjanya. Oleh karena itu, manajer sebuah perusahaan yang profitable akan mengungkapkan informasi yang lebih terperinci dan menyeluruh untuk meningkatkan kepercayaan investor (Anuwar, 2014:52).

Berdasarkan uraian diatas yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi *Corporate Governance* dalam Meningkatkan *Voluntary Disclosure* (Studi pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021)”.

1.2 Perumusan masalah

Dengan adanya uraian latar belakang yang sudah dianalisis, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan publik terhadap peningkatan *voluntary disclosure*?
2. Bagaimana pengaruh dewan komisaris terhadap peningkatan *voluntary disclosure*?
3. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap peningkatan *voluntary disclosure*?
4. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap peningkatan *voluntary disclosure*?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini ialah:

1. Untuk menguji & menganalisis pengaruh kepemilikan publik terhadap peningkatan *voluntary disclosure*
2. Untuk menguji & menganalisis pengaruh dewan komisaris terhadap peningkatan *voluntary disclosure*
3. Untuk menguji & menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap peningkatan *voluntary disclosure*
4. Untuk menguji & menganalisis pengaruh komite audit terhadap peningkatan *voluntary disclosure*

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam tugas akhir ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dapat mengedepankan referensi pada pengembangan teori tentang dampak *corporate governance* terhadap peningkatan *voluntary disclosure* yang dipengaruhi oleh kepemilikan publik, dewan komisaris, komisaris independen dan komite audit perusahaan terhadap peningkatan pengungkapan sukarela serta dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya di bidang pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai wacana bahan evaluasi ke depan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai pengungkapan laporan keuangan.

b. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk membantu meningkatkan *voluntary disclosure* agar bermanfaat sebagai bahan pertimbangan emiten untuk pengambilan keputusan investasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Penerapan *corporate governance* didasarkan pada teori agensi, yaitu teori agensi menjelaskan hubungan antara manajemen dengan pemilik. Manajemen sebagai agen bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak.

Menurut Supriyono, (2018) konsep teori keagenan (*Agency Theory*) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana *principal* memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi *principal* dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak.

Teori Keagenan menurut Ramadona (2016) adalah teori yang berhubungan dengan perjanjian antar anggota di perusahaan. Teori ini menerangkan tentang pemantauan bermacam-macam jenis biaya dan memaksakan hubungan antara kelompok tersebut. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal, Ichsan (2013). Jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal. Pertentangan terjadi apabila agen tidak menjalankan perintah prinsipal untuk kepentingannya sendiri. Pemerintah adalah prinsipal sedangkan perusahaan adalah agen. Pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal memerintahkan kepada perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak. Perusahaan sebagai agen lebih mengutamakan kepentingannya dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Manajer perusahaan yang berkuasa dalam perusahaan untuk pengambilan keputusan sebagai agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan labanya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Karakter manajer perusahaan tentunya mempengaruhi keputusan manajer untuk memutuskan kebijakannya untuk meminimalkan beban termasuk beban pajak dengan mempertimbangkan berbagai macam hal seperti *sales growth* atau *leverage*.

Sebagian besar perusahaan diawasi oleh para ahli. Mereka berfungsi untuk membantu kepentingan perusahaan dan memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan menjalankan kegiatan perusahaan, sehingga untuk situasi seperti ini mereka bertindak sebagai spesialis investor. Dengan perusahaan yang ditangani semakin tinggi, maka keuntungan yang didapat semakin besar pula oleh spesialis. Sementara itu investor dipercaya untuk mengawasi jalannya perusahaan serta demi kepentingan perusahaan, maka mereka menerapkan pengelola manajemen yang insentif.

Untuk mengatasi terjadinya konflik tersebut, maka dibentuk adanya suatu tata kelola perusahaan yang baik di dalam perusahaan sehingga dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan pemilik terhadap manajer bahwa mereka mampu memanfaatkan seluruh sumber daya secara maksimal. Teori keagenan (*agency theory*) menunjukkan adanya ketidakseimbangan data informasi antara agen dan investor. *Information asymmetry* muncul ketika seorang manajer lebih mengetahui apa saja yang terdapat di dalam perusahaan khususnya suatu informasi dan rencana kegiatan perusahaan yang akan datang nantinya dibandingkan dengan stakeholder lainnya (Mardika, 2017).

Pengungkapan media penting untuk mengalahkannya suatu permasalahan khususnya keagenan, dengan adanya pengungkapan informasi sukarela oleh pengelola perusahaan dapat memberikan rancangan tentang keadaan perusahaan tersebut kepada pemangku kepentingan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan kepentingan manajer (Rafifah & Ratmono, 2015).

2.1.2 Voluntary Disclosure

Voluntary disclosure adalah pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh peraturan. Manajemen bebas memilih untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dianggap relevan dan mendukung pengambilan keputusan pemakai yang tertuang dalam pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan sukarela tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap dan transparan oleh pemakai laporan keuangan (Nurkhayati dan Probohudono, 2013)

Disclosure (pengungkapan) merupakan suatu cara untuk mewujudkan transparansi dalam bidang bisnis, selain itu *disclosure* atas laporan tahunan juga dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan investor dan pengguna laporan lainnya. Variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengungkapan yaitu *leverage*, likuiditas, profitabilitas, saham publik dan umur perusahaan (Simanjuntak dan Widiastuti, 2004). Fitriani (2001) variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengungkapan yaitu *size*, status perusahaan, net profit margin, dan KAP.

Gunawan (2000) variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengungkapan yaitu *size* dan solvabilitas. Suropto (1998) variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengungkapan yaitu *size*, *leverage*, likuiditas, basis, waktu terdaftar, penerbitan sekuritas, dan kelompok industri. Dari berbagai variabel yang dapat mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan, maka dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) variabel yaitu *leverage*, *firm size*, dan *profitability*. Ketiga variabel tersebut dirasa mempunyai keterkaitan yang erat mengenai keagenan antara manajemen dengan pemegang saham, investor maupun kreditur.

Disclosure merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan (Suwardjono, 2005). Pengungkapan secara umum adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Secara lebih rinci pengungkapan dapat diwajibkan untuk tujuan melindungi (*protective*), informatif (*informative*), atau melayani kebutuhan khusus (*differential*).

Ada dua macam jenis pengungkapan berdasarkan sifatnya yaitu pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dan pengungkapan wajib. *Voluntary disclosure* adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan. Sebaliknya, pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang dimandatkan oleh standard setter kepada manajemen dalam membuat pelaporan keuangan (Suwardjono, 2005). *Voluntary disclosure* merupakan pengungkapan melebihi yang diwajibkan. *Voluntary disclosure* adalah pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk pembuatan keputusan oleh para pemakai laporan tahunan (Suropto, 2000). Menurut peraturan mengenai laporan tahunan yang berlaku di Indonesia, *voluntary disclosure* semacam itu dimungkinkan. Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009) menyebutkan bahwa PSAK mungkin tidak mengatur pengungkapan informasi tertentu padahal informasi tersebut diperlukan guna menyajikan laporan keuangan secara wajar. Dalam hal tersebut, maka perusahaan harus memberikan tambahan pengungkapan informasi yang relevan sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar.

Pertimbangan manajemen untuk mengungkapkan informasi secara sukarela dipengaruhi oleh faktor biaya dan manfaat (Suropto, 2000). Manajemen akan mengungkapkan informasi secara sukarela bila manfaat yang diperoleh dari pengungkapan informasi mempunyai biaya moneter langsung. Biaya langsung pengungkapan informasi bagi perusahaan adalah nilai dari sumber-sumber daya yang digunakan di dalam mengumpulkan dan

memproses serta di dalam hal audit dan komunikasinya. Oleh karena itu bisa dimengerti kalau perusahaan-perusahaan tidak bersedia untuk mengeluarkan biaya-biaya tambahan melalui pengungkapan yang diperluas atau pengungkapan sukarela kecuali kalau memang diperlukan atau dan diharuskan untuk melakukan hal tersebut atau potensi keuntungannya melebihi kerugian ataupun biaya yang diperkirakan. Perusahaan akan selalu mempertimbangkan biaya dan manfaat yang diperolehnya dengan melakukan disclosure informasi terutama *voluntary disclosure*.

Mahayana & Bagiada (2015) menjelaskan bahwa, pengungkapan sukarela adalah pengungkapan bagi pengguna informasi laporan tahunan dalam pengambilan keputusan ekonomi sesuai dengan kepentingan perusahaan yang relevan. Tingkatan pengungkapan perusahaan yaitu tergantung pada tingkatan pengungkapan yang disajikan oleh sumber-sumber lain. Informasi perusahaan secara sukarela lebih banyak dipengaruhi dan menjadi salah satu pertimbangan manajemen, yaitu faktor biaya dan manfaat.

Pengungkapan informasi pada biaya lebih besar daripada manfaat yang dinyatakan oleh perusahaan. Dalam pengambilan investasi dapat membantu investor dan kreditor untuk mengungkapkan informasi perusahaan. Sedangkan biaya agensi yang berpotensi terjadi diantaranya biaya monitoring, biaya auditing, anggaran, pengawasan, dan ganti rugi agen. Oleh karena itu, sebelum manajemen menyebarkan informasi perusahaan, biaya dan manfaat dari penyediaan informasi tersebut harus diperbandingkan terlebih dahulu (Delvinur, 2015).

2.1.3 Corporate Governance

Pengertian *Corporate governance* didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. (Cadbury Committee, 1992)

Definisi lain juga diungkapkan oleh Bank Dunia (Tunggal dan Widjaja, 2002) yaitu "*Corporate governance* merupakan kumpulan hukum, peraturan dan kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan".

Sutedi (2012) menyebutkan bahwa *corporate governance* ialah seperangkat interaksi yang mengatur antara shareholders, manajemen perusahaan, pihak kreditor, serta stakeholder internal dan eksternal lainnya yang mempunyai hubungan hak & kewajiban, dengan tujuan

untuk menciptakan nilai tambah para pemangku kepentingan. Menurut Effendi dalam buku Salemba Empat (2016), *Good Corporate Governance* ialah suatu prosedur yang didesain untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional menurut prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi & *fairness*.

Prinsip-prinsip dasar dari *Good Corporate Governance* (GCG) pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. Prinsip *Good Corporate Governance* yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No: PER-01/MBU/2011 antara lain:

- a. *Transparency*, artinya keterbukaan dalam mengambil keputusan serta keterbukaan pengungkapan informasi material yang berkaitan dengan perusahaan.
- b. *Accountability*, artinya terdapat fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang jelas agar terlaksana kegiatan secara efektif dalam proses perusahaan.
- c. *Responsibility*, artinya kesesuaian tata kelola perusahaan dengan undang-undang dan asas-asas badan usaha yang sehat.
- d. *Independency*, artinya situasi yang mana terdapat pengelolaan secara profesional pada perusahaan dengan tidak diiringi oleh kepentingan yang berbenturan dan pengaruh/tekanan dari orang lain yang bertentangan dengan undang-undang dan asas-asas badan usaha yang sehat.
- e. *Fairness*, artinya keadilan dan kesamarataan pada pemenuhan hak-hak stakeholders yang muncul karena adanya kesepakatan dan aturan.

Prinsip-prinsip GCG tersebut dapat diterapkan dan diharapkan mampu untuk mengoptimalkan nilai perusahaan dan mampu mencapai tujuan perusahaan dengan pengelolaan yang efektif dan efisien, profesional, serta menjalankan fungsi dan menaikkan kemandirian perusahaan.

2.1.4 Kepemilikan Publik

Public Ownership ialah saham publik yang diukur sebagai perbandingan antara jumlah saham milik publik dengan keseluruhan saham. Publik ialah pihak perseorangan atau individu yang bukan pemilik dan tidak mempunyai hubungan khusus dengan perusahaan (Wardani, 2012). Perusahaan *go public* artinya saham dimiliki secara bebas oleh publik. Jumlah saham yang diungkapkan menunjukkan jumlah informasi pribadi yang harus diungkapkan oleh manajer kepada publik. *Private information* adalah informasi yang hanya diketahui oleh manajer, seperti : pengukuran kinerja dan rencana bonus. Adanya kepemilikan publik menuntut

pengelola untuk memberikan informasi secara berkala dalam bentuk pertanggung jawaban (Purwaty, 2016).

2.1.5 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada direktur Perseroan terbatas. Di Indonesia *Board Of Commissioners* dipilih oleh RUPS dan di dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dijelaskan tentang fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari dewan komisaris. Dewan komisaris ialah salah satu fungsi pengawasan yang termasuk dalam perusahaan. KNKG (2006) mendeskripsikan Dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal utama yang memiliki tanggung jawab bersama serta pengawasan & memberikan masukan kepada direksi dan menunjukkan bahwa perusahaan melaksanakan *Corporate Governance* yang baik.

2.1.6 Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan terhadap internal perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung (Surya dan Yustiavandana, 2006). Komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara transparan kepada para stakeholder tanpa terpengaruh oleh tindakan manajemen. Berdasarkan *agency theory*, apabila jumlah komisaris independen yang terdapat pada dewan komisaris semakin besar, maka semakin baik peran mereka di dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif.

Anggota *Board Of Commissioners* yang bukan merupakan bagian Direksi, yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan untuk berfungsi secara mandiri atau untuk bertindak hanya demi urusan perusahaan. Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan No 33 / POJK 2014 menyebutkan bahwa Dewan Komisaris Independen ialah anggota eksternal dari dewan komisaris emiten atau perusahaan masyarakat yang menanggapi permintaannya sebagai komisaris independen.

Mulyadi (2002) dalam (Silaban, 2015) menjelaskan bahwa Komisaris independen untuk pengawasan manajemen perusahaan oleh direksi & memastikan pengelolaan tersebut, apakah sudah memenuhi dalam hal bertanggung jawab, melaksanakan pengelolaan di dalam perusahaan dan lemahnya pengawasan yang terbatas. Haniffa & Cooke (2002) berpendapat bahwa komisaris independen yang besar dapat memberi kekuatan dewan komisaris untuk

melobi guna kualitas pengungkapan lebih meningkat. Semakin tinggi persentase komisaris independen, semakin baik kemampuan pemantauannya.

2.1.7 Komite Audit

Berdasarkan ketentuan “Pasal 1 ayat (1)” Peraturan OJK 55/2015, komite audit adalah komite yang dibuat untuk berkontribusi dalam pelaksanaan tugas & fungsi serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Sesuai Peraturan OJK POJK.04/tahun 2016, Komite Audit menyelidiki informasi keuangan yang harus diungkapkan oleh perusahaan efek kepada masyarakat dan atau kapasitas otoritas, dan merekomendasikan kepada dewan komisaris tentang lingkup pekerjaan, biaya, mengajukan rencana tinjauan jaminan akuntan, kinerja audit, tinjauan pengendalian internal bursa serta penerapan manajemen risiko. Adanya komite audit, direncanakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan. Komite audit berperan utama dalam pengawasan berbagai aspek organisasi.

2.1.8 Profitabilitas Perusahaan

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan hubungan antara laba dengan penjualan dan investasi (Van Horne dan Wachowics, 2007). Profitabilitas dapat mencerminkan pengembalian yang diterima oleh pemegang saham. Semakin tinggi profitabilitas tentunya semakin tinggi pula pengembalian yang diterima oleh pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi tentunya lebih menarik bagi investor dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah. Perusahaan akan melakukan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan pada tingkat yang lebih rinci dan lengkap, untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh investor dan pengguna informasi lainnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun tabel berikut ini yang menunjukkan penelitian sebelumnya tentang dampak *Corporate Governance* terhadap *Voluntary Disclosure*.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul	Objek Penelitian dan Tahun Pengamatan	Alat Analisis & Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rini Fatmawati, Dessy Widya Astuti, Djoko Suhardjanto (2018) <i>Peran Corporate Governance dalam Meningkatkan Voluntary Disclosure</i>	Perusahaan tambang yang terdaftar di BEI (2014-2016)	Regresi Linier Berganda X1= Kepemilikan Publik X2= Dewan Komisaris X3= Komisaris Independen X4= Komite Audit Y= Pengungkapan Sukarela	Kepemilikan Publik, Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela
2	Muhamad Fauzan Birawanto, Erwin Saraswati (2019) pengaruh good corporate governance terhadap pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2015-2017)	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (2015-2017)	Regresi Berganda X1= Dewan Komisaris Independen X2= Dewan Komisaris X3= Komite Audit X4= Kepemilikan Keluarga X5= Kepemilikan Publik Y= Pengungkapan Sukarela	Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Komite Audit, Kepemilikan Keluarga dan Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela

Tabel 2.2 Lanjutan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul	Objek Penelitian dan Tahun Pengamatan	Alat Analisis & Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
3	Felia Prajna Kumala, Elsa Imelda (2022) Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Pengungkapan Sukarela	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (2017-2019)	Regresi Berganda X1=Non-executive Directors X2= Board Size X3= Skala KAP Y=Pengungkapan Sukarela	-Non-executive Directors berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap pengungkapan sukarela -Board Size berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan sukarela -Skala KAP berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap pengungkapan sukarela
4	Erwin Saraswati, Alfizah Azzahra, Ananda Sagitaputri (2020) Corporate Governance Mechanism and Voluntary Disclosure	Perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI (2016-2018)	Regresi Berganda X1= Board Size X2= Board Independence X3=Institutional ownership X4= Family Ownership X5= Firm Size X6= Auditor Size Y=Pengungkapan Sukarela	-Board Size dan Board Independence Berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan sukarela -Institutional Ownership berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan sukarela -Family Ownership berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela - Firm Size dan Auditor Size berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela

Tabel 2.3 Lanjutan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul	Objek Penelitian dan Tahun Pengamatan	Alat Analisis & Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5	Andrew Gunawan (2019) The Role of Corporate Governance Mechanism on Voluntary Disclosure	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (2015-2017)	Regresi Berganda X1= Independent Board of Commissioners X2=Board of Commissioners with Accounting or Business Ability X3=Independent Audit Committee Y=Pengungkapan Sukarela	-Independent Board of Commissioners dan Independent Audit Committee tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela -Board of Commissioners with Accounting or Business Ability berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan sukarela
6	Avininda Dewi Nindiasari (2021) Good Corporate Practices and Voluntary Disclosure in Companies Listed in the Indonesia Sharia Stock Index (ISSI)	Perusahaan yang terdaftar di Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) (2015-2016)	Regresi Linier Berganda X1=Board of Commissioners X2=Independent Commissioners X3= Family Ownership X4= Audit Quality Y=Pengungkapan Sukarela	-Board of Commissioners dan Audit Quality berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan sukarela -Independent Commissioner dan Family Ownership Tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan sukarela

Tabel 2.4 Lanjutan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul	Objek Penelitian dan Tahun Pengamatan	Alat Analisis & Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
7	Ula Restu Rafifah, Dwi Ratmono (2015) Pengaruh mekanisme corporate governance terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (2010-2013)	Regresi Berganda X1=Dewan Komisaris Independen X2=Dewan Komisaris yang Memiliki Kemampuan Akuntansi atau Bisnis X3=Jumlah Rapat Dewan Komisaris X4= Ukuran Dewan Komisaris X5= Komite Audit Independen X6= Proporsi Komite Audit yang Memiliki Kemampuan Akuntansi atau Bisnis X7= Jumlah Rapat Komite Audit X8= Kualitas Auditor X9= Kepemilikan Institusional Y= Pengungkapan Sukarela	-Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pengungkapan sukarela -Dewan Komisaris yang Memiliki Kemampuan Akuntansi atau Bisnis, Ukuran Dewan Komisaris, Kualitas Auditor dan Kepemilikan Institusional Jumlah Rapat Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela - Komite Audit Independen berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan sukarela
8	Putu Wisnu Wiguna (2019) Pengaruh leverage, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan likuiditas terhadap luas pengungkapan sukarela	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011	Y=Luas Pengungkapan Sukarela X1= Leverage X2 = Ukuran Perusahaan Corporate Governance X3 = Profitabilitas X4 = Likuiditas	-Leverage, profitabilitas dan likuiditas perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela(voluntary disclosure). -Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela.

2.3 Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Peningkatan Pengungkapan Sukarela

Kepemilikan publik diukur sebagai rasio saham umum terhadap total saham. Publik adalah pihak perseorangan atau individu eksternal manajemen dan tidak memiliki hubungan

khusus dengan perusahaan (Wardani, 2012). Hal ini berdampak positif terhadap eksistensi masyarakat. Perusahaan dengan persentase kepemilikan publik yang tinggi akan mengakibatkan perusahaan wajib memberikan pengungkapan informasi yang lebih besar (Purwandari, 2012).

Penelitian yang dilaksanakan oleh Fatmawati, Astuti & Suhardjanto (2018), mengungkapkan bahwa kepemilikan publik berdampak positif terhadap luas pengungkapan sukarela. Adanya kepemilikan publik dapat memberikan informasi yang cukup untuk meminimalkan asimetri informasi dengan memberikan sinyal positif kepada investor untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan hipotesis berikut ini :

H1: Kepemilikan Publik mempunyai pengaruh positif terhadap Peningkatan Voluntary Disclosure

2.3.2 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Peningkatan *Voluntary Disclosure*

Dewan Komisaris atau *Board Of Commissioners* mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi serta memiliki kewajiban untuk memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan kepada semua level atau jenjang organisasi. Dewan komisaris berperan dalam kegiatan manajemen sebagai puncak dari sistem manajemen internal perusahaan. Porsi dewan komisaris menentukan kebijakan perusahaan dalam *voluntary disclosure*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2019) dan Fatmawati *et al.*, (2018) yang menyatakan *Board of Commissioners Berdampak* positif terhadap luas *voluntary disclosure*. Adanya *Board Of Commissioners* Dapat bisa melakukan kontrol yang lebih ketat di dalam perusahaan dan menyampaikannya secara sukarela. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan hipotesis berikut ini:

H2: Dewan Komisaris mempunyai pengaruh positif terhadap Peningkatan Voluntary Disclosure

2.3.3 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Peningkatan Pengungkapan Sukarela

Independent Commissioner harus melakukan pengawasan fungsional secara efektif dan efisien dan memberikan nasihat kepada direksi dalam suatu berbagai cara. Hal tersebut dapat menambahkan nilai tambah bagi perusahaan (Riniati, 2015). Semua pemangku kepentingan, terutama *stakeholder* akan mendapat manfaat yang signifikan dari komisaris independen (Safietrie, 2017). Komisaris independen memiliki akses istimewa ke informasi yang terkait dengan perusahaan. Komisaris independen melakukan tanggung jawab bagi menentukan perusahaan berjalan dengan baik dan bahwa perusahaan memiliki sistem informasi dan manajemen yang baik. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki komisaris independen yang bertindak sebagai pengawas organisasi, seperti apakah sistem dalam perusahaan tersebut diterapkan dengan baik ataukah tidak? Dengan demikian, semakin banyak anggota komisaris independen, semakin transparan informasi yang diungkapkan serta dapat mengurangi asimetri informasi.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Saraswati *et al.* (2020) & Fatmawati *et al.*, (2018) yang menyatakan *Independent Commissioner Berdampak* positif terhadap luas *voluntary disclosure*. Adanya Komisaris Independen dapat memberikan tingkat pengawasan manajemen, semakin efektif jika persentase anggota komisaris independen yang hadir di perusahaan dan mengungkapkannya secara sukarela. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan hipotesis berikut ini:

H3: Komisaris Independen mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan voluntary disclosure

2.3.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Peningkatan *Voluntary Disclosure*

Komite audit ialah badan yang mempunyai tanggung jawab serta menjalankan fungsinya Dewan Komisaris. Secara khusus komite audit mempunyai tugas utama ialah menyelidiki dan memantau proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal. Komite audit juga berupaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kelayakan dan obyektivitas pelaporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan akan adanya pengendalian internal dan pelaporan yang lebih baik. Peran komite audit ialah menjaga kerahasiaan dokumen dan secara sukarela mengungkapkan informasi yang diberikan oleh perusahaan.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Fatmawati *et al.*, (2018) yang mengungkapkan bahwa *audit committee* berdampak positif terhadap luas *voluntary disclosure*. Sedangkan menurut Ratmono & Rafifah (2015) komite audit berpengaruh negatif terhadap *voluntary disclosure*. Keberadaan Komite Audit yang bertanggung jawab atas kerahasiaan dokumen dan pengungkapan secara sukarela di perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan hipotesis berikut ini:

H4: Komite Audit mempunyai pengaruh positif terhadap Peningkatan voluntary disclosure

2.3.5 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Peningkatan Voluntary Disclosure

Profitabilitas dapat mencerminkan pengembalian yang diterima oleh pemegang saham. Semakin tinggi profitabilitas tentunya semakin tinggi pula pengembalian yang diterima oleh pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi tentunya lebih menarik bagi investor dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah. Perusahaan akan melakukan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan pada tingkat yang lebih rinci dan lengkap, untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh investor dan pengguna informasi lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Rahmadani (2016) Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *voluntary disclosure*. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dijelaskan hipotesis berikut ini :

H5: Profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap voluntary disclosure

2.4 Kerangka Penelitian

Adanya kepemilikan publik diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif kepada pemangku kepentingan khususnya tentang laporan keuangan.

Kepemilikan publik dapat didefinisikan sebagai kepemilikan saham yang dikelola oleh publik. Semakin besar kepemilikan saham dibawah kendali publik, semakin besar kebutuhan pengungkapan keuangan secara penuh (Choi, 2010). Semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang suatu perusahaan lebih banyak, maka detail yang perlu diungkapkan semakin banyak & oleh karena itu semakin luas pengungkapan informasi tentang suatu perusahaan (Hardiningsih, 2008).

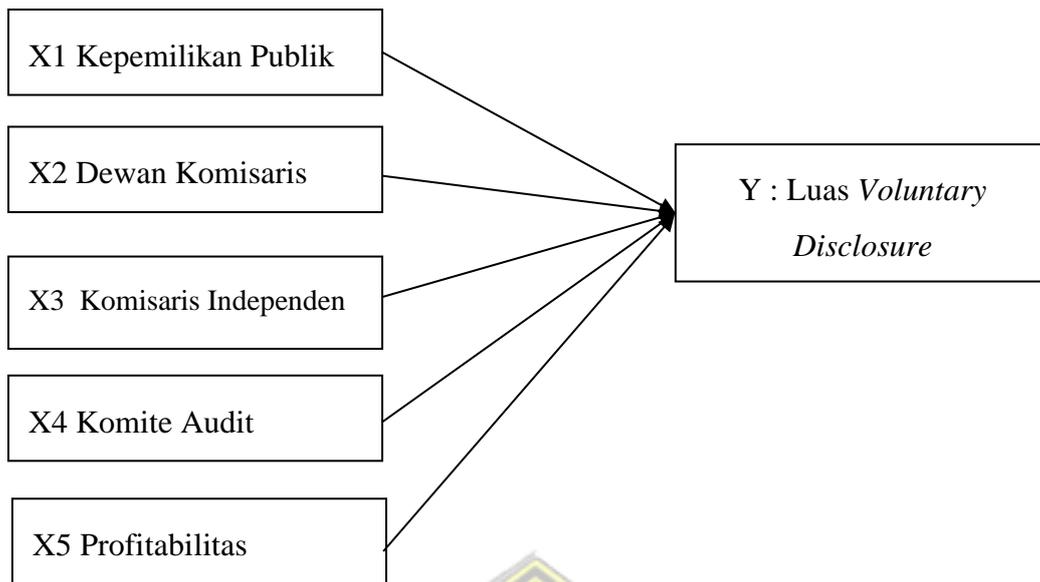
Dewan Komisaris adalah salah satu fungsi manajemen suatu perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, dewan komisaris merupakan mekanisme internal utama dan bertindak sebagai jembatan antara kepentingan pribadi dan manajer perusahaan. Maka dewan komisaris memegang peran utama dalam mengawasi kebijakan pengungkapan yang diterapkan manajemen, sehingga semakin besar jumlah anggota dewan komisaris terlibat dalam pengawasan terhadap kegiatan operasional perusahaan (Marsudi, 2016).

Komisaris Independen ialah anggota kelompok dewan komisaris yang diakui perusahaan tetapi tidak memiliki hubungan secara langsung dengan direksi, pemegang saham utama dan anggota dewan komisaris. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas anggota dewan komisaris independen dan memungkinkan dia untuk bertindak secara independen dan menghindari hubungan yang dapat mempengaruhi kepentingan pribadinya. Semakin tinggi persentase anggota komisaris independen, semakin efektif dan efisien pemantauan manajemen dan semakin sukarela dalam mengungkapkan laporan perusahaan.

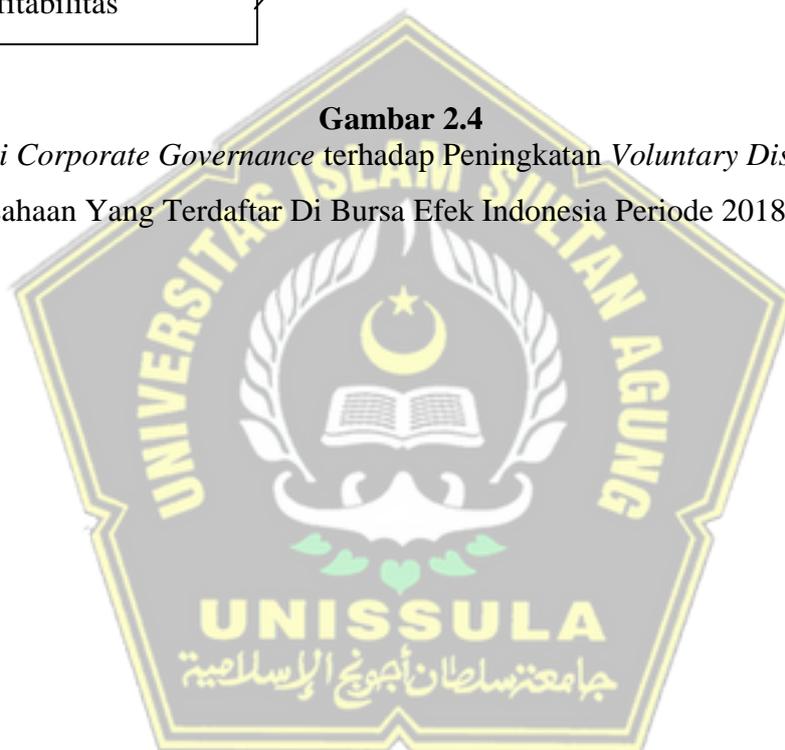
Komite Audit adalah komite yang dipilih untuk membantu pencapaian tugas & fungsi dewan komisaris. Kewenangan untuk membentuk komite ada pada dewan komisaris dan kewenangan lainnya ada pada dewan komisaris. Komite audit memiliki tugas utama dan tanggung jawab ialah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip *corporate governance*, terutama transparansi dan keterbukaan, diterapkan secara konsisten dan menyeluruh oleh para manajer. Komite audit dipandang sebagai struktur pengawasan sukarela yang digunakan dalam keadaan dimana diperlukan biaya untuk meningkatkan kualitas arus informasi antara prinsipal dengan agen (Mujiyono & Nany, 2010).

Tingkat profitabilitas perusahaan mempengaruhi peningkatan pengungkapan sukarela. Semakin tinggi margin laba perusahaan, semakin lengkap tingkat pengungkapannya perusahaan tersebut (Indrayani, 2014). Hal ini terkait dengan *reward* yang diperoleh manajer atas keuntungan yang diperolehnya.

Kerangka penelitian teoritis yang menggambarkan hubungan antara variabel dalam penelitian ini dengan dengan Peningkatan Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*) dapat digambarkan berikut ini :



Gambar 2.4
Implementasi Corporate Governance terhadap Peningkatan Voluntary Disclosure (Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021)



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian yang menggunakan data numerik atau angka lebih menekankan pada proses penelitian yang mengukur hasil objektif dan menggunakan analisis statistik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan investigasi mendalam pada topik tertentu. Menurut Indriantoro & Supomo (2014) ruang lingkup penelitian mungkin terkait dengan siklus kehidupan atau mungkin hanya mencakup faktor atau elemen tertentu serta kejadian secara keseluruhan.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini ialah perusahaan manufaktur yang termasuk pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2021. Cara pengambilan sampel yang dilaksanakan ialah metode *purposive sampling* ialah cara pengambilan sampelnya dengan menyesuaikan ciri, tujuan yang sama. Adapun standar yang digunakannya dalam pemilihan sampel penelitian ini ialah :

1. Perusahaan manufaktur
2. yang termasuk di BEI selama periode 2018-2021
3. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangannya selama periode pengamatan
4. Data yang tersedia lengkap, ialah data yang diperlukan untuk mendeteksi variabel *corporate governance* dan *voluntary disclosure*.
5. Laporan Keuangan tidak disajikan dalam mata uang asing

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian yang digunakannya ialah data sekunder. Data sekunder merupakan asal data penelitian, didapatkan secara tidak langsung dari peneliti melalui media perantara, ialah data dari laporan keuangan tahunan perusahaan BEI pada tahun 2018-2021.

Dan jenis data yang digunakan ialah data dokumenter yang berupa jurnal, surat-surat, memo, ataupun dalam bentuk laporan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dapat dijelaskan sebagai teknik untuk mendapatkan data secara fisik untuk dianalisis dalam suatu studi penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan lewat web www.idx.co.id. Sedangkan data sekunder yang diolah dan diperoleh dari data yang telah terdokumentasi sebelumnya. Metode dokumentasi ini dilakukannya dengan cara mencari dan meringkas serta dikumpulkan data sekunder yang dipublikasikannya pemerintah ialah Bursa Efek Indonesia berupa *annual report* perusahaan pada tahun 2018-2021.

3.5 Variabel dan Indikator

Variabel & indikator yang digunakan ada dua jenis variabel, ialah variabel bebas, terikat

3.5.1 Variabel Terikat (*Voluntary Disclosure*)

Voluntary disclosure ialah penyajian informasi sukarela perusahaan, diluar penyampaian wajib. Penyajian sukarela yang dilaksanakan penelitian ini ialah bagian-bagian penyampaian sukarela yang diteliti sebelumnya ialah Nuryaman (2009) ada 9 item yang disimpulkan, 9 item/poin ialah:

1. Informasi umum perusahaan
2. Profil perusahaan
3. Ikhtisar keuangan
4. Informasi komisaris dan direksi perusahaan
5. Analisis dan pembahasan manajemen atas kinerja perusahaan
6. Informasi tentang proyeksi dan prospek bisnis
7. Informasi karyawan
8. Kebijakan dan tanggung jawab sosial
9. Informasi tata kelola perusahaan

Perhitungan indeks kelengkapan *voluntary disclosure* dilakukan dengan memberikan nilai setiap bagian pengungkapan. Jika suatu bagian diungkap, maka mendapatkan nilai 1, dan jika tidak mengungkapkan maka mendapat nilai 0. Skor tersebut di total, supaya dapat menghitung secara keseluruhan. *Voluntary Disclosure* dihitung sebagai berikut:

$$\text{VOLDISC} = \frac{\sum Q}{\sum S} \times 100\%$$

Keterangan:

VOLDISC = Indeks kelengkapan *voluntary disclosure*

Q = Item kelengkapan pengungkapan sukarela yang disajikan dalam *annual report*

S = Semua item kelengkapan *voluntary disclosure* yang diharapkan, terdapat pada instrumen.

Data pengungkapan sukarela diperoleh dari laporan tahunan perusahaan.

3.5.2 Variabel Bebas (*Corporate Governance*)

Corporate Governance adalah struktur yang menentukan pembagian hak dan tanggung jawab di antara berbagai pihak dalam perusahaan—seperti pemegang saham, dewan direksi, manajer, dan pemangku kepentingan lainnya—serta menetapkan aturan dan prosedur untuk pengambilan keputusan perusahaan.

1. Kepemilikan Publik

Menurut Wijayanti (2009), mengemukakan bahwa kepemilikan publik ini ialah jumlah saham masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan khusus dengan perusahaan. Kepemilikan publik mengacu pada persentase saham yang dimiliki oleh pihak luar (*outsider ownership*). Tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan, sehingga perlu dibiayai melalui pembiayaan internal dan eksternal. Sumber pendanaan eksternal berasal dari saham publik. Kepemilikan Publik dapat diukur dengan kepemilikan saham perusahaan oleh masyarakat dibagi dengan total saham yang dimiliki perusahaan yang beredar dikali 100% (Peters & Romi, 2015).

Kepemilikan Saham Perusahaan oleh masyarakat

$$\text{KSP} = \frac{\text{Saham yang dimiliki perusahaan yang beredar}}{\text{Saham yang dimiliki perusahaan yang beredar}} \times 100$$

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris ialah sebuah anggota dewan yang mempunyai tugas mengawasi dan memberikan saran kepada Direktur Perseroan Terbatas. Di Indonesia Dewan Komisaris dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan di dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang didalamnya menjelaskan fungsi, wewenang, serta tanggung jawab dari *Board of Commissioners*. Dewan Komisaris = Total anggota *Board of Commissioners* (Ujiyantho & Pramuka, 2007)

3. Komisaris Independen

Komisaris Independen ialah anggota *Board Of Commissioners* eksternal perusahaan dan ditunjuk menurut keputusan RUPS. Jumlah Dewan Komisaris Independen dirumuskan dengan cara membagi anggota dewan komisaris eksternal dibagi seluruh ukuran dewan komisaris dikali 100% (Ujiyantho & Pramuka, 2007)

$$\text{PDKI} = \frac{\text{Dewan Komisaris luar}}{\text{Ukuran Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

4. Komite Audit

Tugas Komite Audit (*Audit Committee*) ialah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh pengelolaan perusahaan benar-benar mencerminkan status keuangan, kinerja operasi, serta menerapkan bahwa perusahaan menjalankan sesuai Undang-undang & peraturan yang berlaku, menjalankan bisnis dengan cara yang etis serta mengawasi proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

Komite Audit = Total seluruh anggota komite audit pada masing-masing perusahaan (Huang & Kang, 2017).

5. Profitabilitas

Profitability mengacu pada kekuatan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pada susun penjualan, asset & modal saham dalam periode waktu tertentu. Dan bertujuan untuk mengukur efisiensi kegiatan perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Pengertian *Return On Assets* (ROA) secara umum merupakan jenis dari rasio profitabilitas, dimana biasanya dimanfaatkan untuk menilai kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam memperoleh laba lewat aktiva. Dengan adanya rasio ini, kemampuan dari perusahaan tersebut dinilai sesuai dengan keuntungan yang diperoleh dalam periode lampau supaya bisa digunakan pada masa atau periode berikutnya. Semakin besar nilai ROA semakin baik kinerja perusahaan (Pradipta & Supriyadi, 2015).

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

3.6 Teknik Analisis

Teknik analisis ini ada tiga bagian ialah statistic deskriptif, uji asumsi klasik, & analisis regresi linier berganda dengan tujuan untuk mendeteksi hipotesis.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ialah memberikan suatu rancangan atau informasi data untuk menyelidiki data serta dengan perhitungan supaya dapat mengetahui karakteristik data tersebut dan untuk mendapatkan nilai mean, nilai minimal, maksimal, *average* & standar deviasi.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka diadakan pengujian uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan, maka model tersebut harus memenuhi asumsi klasik regresi. Wajib diperhatikan bahwa mendeteksi persamaan regresi atau model regresi, persamaan regresi sebelumnya harus memenuhi uji asumsi klasik terlebih dahulu. Hal ini karena persamaan regresi akan dijadikan untuk alat produksi. Uji asumsi klasik memiliki tujuan adalah untuk

mendeteksi model regresi tersebut apakah sudah memenuhi asumsi klasik / belum. Uji asumsi klasik yang akan digunakannya penelitian ini, antara lain:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk melihat data tersebut terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi dapat dikatakan bagus jika mempunyai nilai residual yang terdistribusi wajar atau mendekati wajar. Berikut ada dua cara untuk mengetahui data tersebut wajar atau tidak wajar ialah dengan analisis grafik dan analisis statistik (Ghozali, 2018). Pengujian normalitas yang pertama ialah menggunakan analisis grafik *normal probability plot* (P-Plot) dengan kriteria apabila titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal & searah dengan grafik histogramnya, maka memperlihatkan pola distribusi normal dan model regresi terpenuhi. Apabila data tersebut menyebar jauh & tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tersebut tidak terpenuhi. Pengujian normalitas yang kedua ialah analisis Statistik. Uji ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika hasil KS menunjukkan hasil signifikan dibawah 0,05 maka data tidak terdistribusi normal maupun sebaliknya (Ghozali, 2018).

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas mempunyai tujuan bagi mengetahui model regresi tersebut apakah ditemukannya korelasi antar variabel independen atau tidak. Model regresi bagus semestinya korelasi itu tidak terjadi diantara variabel independen. Cara mendeteksi Multikolinieritas wajar atau tidak wajarnya ialah cara melihat dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance*. Angka *cutoff* yang dasarnya dipakainya untuk memperlihatkan normalnya multikolinieritas adalah angka *tolerance* kurang dari 0,10 atau = angka $VIF > 0,10$ (Ghozali, 2018).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas mempunyai tujuan bagi mengetahui model regresi tersebut apakah menunjukkan ketidaksamaan variansi dan residual antara satu yang diamati dengan pengamatan yang lain. Jika *variance* dari pengamatan satu ke pengamatan lainnya tetap, oleh karena itu model regresi tersebut termasuk homoskedastisitas, maupun sebaliknya jika berbeda pengamatan maka dapat disebut heteroskedastisitas. Untuk menguji normal tidaknya heteroskedastisitas dengan mengamati muncul tidaknya suatu acuan pada grafik *scatterplot* antara residual (SRESID) & variabel terikat (ZPRED). Umumnya analisisnya ialah berikut ini: (Ghozali, 2018)

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas
- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah mempunyai tujuan bagi mengetahui model regresi linier apakah terjadi kolerasi kesalahan pengganggu terhadap periode t, kesalahan periode-t atau tidak. Apabila terdapat kolerasi, dapat diartikan terdapat *problem* autokorelasi. Cara mendeteksi masalah autokorelasi ialah menggunakan cara uji *Durbin Watson* (DW) kemudian membandingkan hasil uji dengan tabel *Durbin Watson* (DW). Bila $dL \leq d \leq dU$ atau $(4-dU) \leq d \leq (4-dL)$ oleh karena itu hasil ujinya ialah tanpa keputusan. Kemudian jika $dU \leq d \leq (4-dU)$, maka tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya, bila $d \geq (4-dL)$ maka kesimpulannya ialah terdapat autokorelasi positif (Ghozali, 2018).

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakannya untuk mendeteksi dampak variable (x) terhadap variable (y) dengan rumusan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \beta X_4 + \beta X_5 + e$$

$$Y = \text{Voluntary disclosure}$$

$$\alpha = \text{konstanta}$$

$$\beta = \text{Koefisien Regresi}$$

$$X_1 = \text{Kepemilikan Publik}$$

$$X_2 = \text{Dewan Komisaris}$$

$$X_3 = \text{Komisaris Independen}$$

$$X_4 = \text{Komite Audit}$$

$$X_5 = \text{Profitabilitas (Variabel Kontrol)}$$

$$e = \text{error}$$

3.6.4 Pengujian Hipotesis

Berikut adalah beberapa pengujian hipotesis yang akan dilakukan :

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dipergunakan bagi memprediksi berapa tinggi kontribusi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil dari uji koefisien determinasi antara $0 < R^2 < 1$. Jika nilai koefisien determinasi mendekati nilai 1 artinya kemampuan variabel (x) sangat tepat untuk menjelaskan variabel (y) begitupun sebaliknya (Ghozali, 2018).

2. Uji Statistik F

Uji statistik F ialah ketepatan terhadap menaksir angka yang positif dalam fungsi regresi sampel. Jika angka signifikan $F < 0,05$, maka model regresi tersebut dilaksanakan bagi memperhitungkan variabel bebas. Uji statistik F juga memperlihatkan semua variabel bebas yang dimasukkan apakah termasuk model yang dipengaruhi secara kolektif terhadap variabel terikat atau tidak. Uji Statistik F mempunyai signifikan 0,05 (Ghozali, 2018). Kriteria pengujian hipotesis dalam penggunaan statistik F adalah ketika nilai signifikansi F kurang dari 0,05, maka H_0 diterimanya, yang menunjukkan bahwa keseluruhan bebas dengan simultan & signifikan dapat berpengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018).

3. Uji Statistik t

Uji statistik t mempunyai tujuan untuk mengetahui tingkat signifikan dampak antara variabel bebas dan variabel terikat. Kriteria pengujian ini ditetapkan berdasarkan probabilitas. Apabila tingkat signifikan yang digunakan sebesar 5%, dengan kata lain jika probabilitas $H_0 > 0,05$ maka dinyatakan tidak signifikan, dan jika probabilitas $H_0 < 0,05$ maka dinyatakan signifikan (Ghozali, 2018).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek atau Subyek Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diambilnya dari *annual report* perusahaan manufaktur yang termasuk di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2021 dengan metode unduh lewat website www.idx.co.id. Jumlah populasi pada perusahaan manufaktur adalah sebanyak 182 perusahaan. Pengambilan sampel dengan menggunakan cara *purposive sampling*, menurut standar & pertimbangan tertentu. Dari 182 perusahaan manufaktur yang termasuk di BEI pada periode 2018-2021 hanya 24 perusahaan yang sama standar pengambilan sampel. Berikut penarikan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah :

Tabel 4.1 Seleksi Pemilihan Sampel

NO.	KRITERIA	JUMLAH
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2018-2021	182
2.	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan selama periode Pengamatan	(79)
3.	Data yang tidak tersedia lengkap, yaitu data yang diperlukan untuk mendeteksi variabel <i>corporate governance</i> dan pengungkapan sukarela	(40)
4.	Laporan Keuangan disajikan dalam mata uang asing (Data yang tidak digunakan atau tidak masuk dalam kriteria)	(39)
	Jumlah sampel yang memenuhi kriteria	24
	Jumlah sampel penelitian (24x 4 tahun)	96

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilaksanakan bagi mewujudkan tentang nilai rata-rata, terendah, tertinggi & standar deviasi setiap variabel (x) maupun (y). Variabel bebas pada penelitian ini diantaranya kepemilikan publik, dewan komisaris, komisaris independen, komite audit & Profitabilitas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan sukarela. Menghitung statistik deskriptif dapat menggunakan bantuan SPSS 16. Berikut hasil yang didapatkan ialah :

Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Luas Pengungkapan Sukarela	96	.87	.99	.9683	.03080
Kepemilikan Publik	96	.003	.510	.24693	.144125
Dewan Komisaris	96	2	13	4.67	2.180
Komisaris Independen	96	.30	.80	.3951	.11238
Komite Audit	96	3	5	3.10	.369
Profitabilitas	96	.001	2.689	.21573	.393437
Valid N (listwise)	96				

Sumber : Data yang diolah

Menurut hasil analisis statistik deskriptif yang sudah diuji, maka ditariknyakesimpulan adalah :

1. Luas pengungkapan sukarela (LPS) terendah adalah 0,87. Hal ini memperlihatkan bahwa nilai luas pengungkapan sukarela paling minimum diantara perusahaan sampel ialah 87% & luas pengungkapan sukarela (LPS) tertinggi dengan skor 0,99. Hal ini memperlihatkan bahwa nilai luas pengungkapan sukarela (LPS) paling maksimal diantaranya perusahaan sampel ialah 99%. Luas pengungkapan sukarela (LPS) mendapat nilai rata-rata 0,9683 yang memperlihatkan bahwa tingkat *voluntary disclosure* pada perusahaan manufaktur yang termasuk di BEI adalah sebesar 96,83% dari keseluruhan pengungkapan laporan secara *full*. Maka ditariknya kesimpulan bahwa rata-rata untuk LPS pada perusahaan manufaktur yang termasuk di BEI masih tergolong sangat minimum. Nilai standar deviasi 0,03080 / 3,08%. Dapat ditunjukkannya bahwa penyebaran data luas pengungkapan sukarela (LPS) cukup homogen karena mempunyai standar deviasi < rata-rata.
2. Kepemilikan Publik mempunyai angka terkecil 0,003 / 3%. Dapat ditunjukkannya

bahwa angka dari *Public Ownership* perusahaan paling mimum diantarnya perusahaan sampel yaitu 0,003 / 3% ialah Fajar Surya Wisesa Tbk. periode 2019. Sedangkan angka tersbesar 0,510 / 51%. Hal ini mengartikan bahwa angka dari nilai perusahaan paling maksimal diantarnya perusahaan sampel ialah 0,510 / 51% pada Ultra Jaya *Milk Industry & Trading Company* Tbk tahun 2016. Nilai rata-rata dari kepemilikan publik ialah 0,24693 / 24,69%. Hal ini bahwa rata-rata nilai *public ownership* dari perusahaan sampel ialah 0,24693 atau 24,69%. Angka standar deviasi 0,144125 atau 14,41% dapat diartikannya bahwa menyebarnya data kepemilikan publik cukup homogen karena mempunyai standar deviasi lebih kecil nilai rata-rata.

3. Dewan Komisaris mempunyai angka terkecil 2,00 / 2% Hal ini menunjukkan angka dari dewan komisaris perusahaan paling minmal diantarnya perusahaan sampel ialah 2,00 / 2% ialah Garuda Metalindo Tbk tahun 2018 dan Selamat Sempurna Tbk tahun 2019, 2020, 2021. Dilihat dari angka terbesar 13,00 atau 13%. Dapat mengartikan bahwa nilai dari angka perusahaan paling maksimal diantarnya perusahaan sampel ialah 13,00 / 13% pada Astra International Tbk periode 2018. Nilai rata-rata dewan komisaris ialah 4,67 / 467%. Hal ini bahwa rata-rata nilai dewan komisaris dari perusahaan sampel ialah 4,67 atau 467%. Angka standar deviasi sebesar 2.180 atau 218%, ini memperlihatkan bahwa menyebarnya data anggota dewan komisaris cukup homogen karena mempunyai standar deviasi < nilai rata-rata.
4. Komisaris Independen memiliki nilai minimum sebesar 0,30 atau 3% yang diperoleh Astra International Tbk. pada tahun 2018 dan 2019. Dapat memperlihatkan bahwa Astra International Tbk. pada periode 2018 dan 2019 ialah perusahaan dengan ukuran minimal diantarnya sampel perusahaan lain. Nilai tertinggi 0,80 atau 8% yang diperoleh Unilever Indonesia Tbk. selama 4 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Unilever Indonesia Tbk. dalm 4 tahun ialah perusahaan dengan ukuran maksimal diantarnya sampel perusahaan lain. Angka *mean* dari ukuran perusahaan ialah 0,3951 atau 39,51%. Hal ini bahwa perusahaan-perusahaan sampel relatif terdaftar perusahaan dalam ukuran tinggi. Nilai standar deviasi 0,11238 atau 11,24 ini memperlihatkan bahwa menyebarnya data komisaris independen cukup homogen karena mempunyai standar deviasi lebih rendah

daripada nilai rata-rata.

5. Komite Audit mempunyai angka terendah yaitu 3. Hal ini memperlihatkan bahwa nilai komite audit di suatu perusahaan paling sedikit diantaranya perusahaan sampel ialah 3. Angka tertinggi yaitu 5. Dapat diartikannya bahwa angka dari nilai perusahaan maksimal diantaranya perusahaan sampel ialah 5. Nilai *mean* komite audit adalah sebesar 3,10 atau 31%. Hal ini bahwa *average* nilai komite audit dari perusahaan sampel yaitu 31%. Nilai standar deviasi 0,369 atau 37% dapat diartikannya bahwa disebarnya data komite audit cukup heterogen karena memiliki standar deviasi > rata-rata.
6. Profitabilitas memiliki nilai terendah sebesar 0,001 atau 1%. Hal ini memperlihatkan bahwa angka dari profitabilitas di suatu perusahaan minimum diantaranya perusahaan sampel ialah 1%. Nilai tertinggi 2,689 / 269%. Hal ini diartikannya bahwa nilai dari nilai profitabilitas maksimal diantaranya perusahaan sampel adalah sebesar 269%. Nilai rata-rata dari *profitability* ialah sebesar 0,21573 atau 21,58%. Hal ini bahwa rata-rata angka profitabilitas dari perusahaan sampel yaitu 21,58%. Nilai standar deviasi sebesar 0,393437 atau 39,34% dapat diartikannya bahwa menyebarnya data profitabilitas cukup heterogen karena mempunyai standar deviasi lebih tinggi dari nilai rata-ratanya.

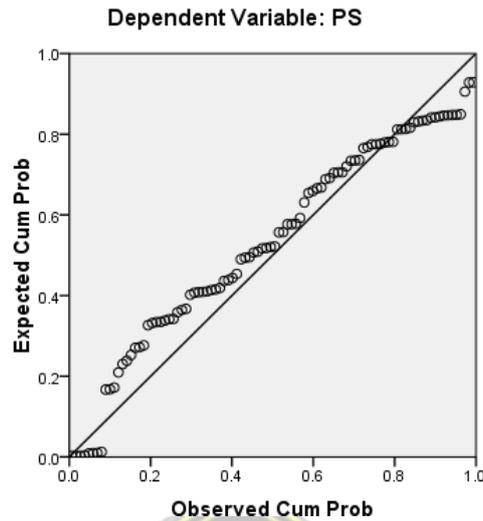
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas ialah bagi mendeteksi data yang digunakan penelitian ini apakah berdistribusi wajar maupun tidak. Ada dua cara bagi mendeteksi, yaitu menggunakan analisis grafik & analisis statistik. Uji statistik yang dilaksanakan bagi uji normalitas adalah uji statistik non-parametrik *One- Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Berikut hasil uji normalitas data sampel :

- a) Analisis Grafik

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas

Gambar 4.1 merupakan grafik P-P Plot. Grafik P-P Plot dicermati menyebarnya item di garis diagonal pada grafik. Grafik P-P Plot dikatakan tidak memenuhi syarat asumsi normalitas apabila item menyebar dan menjauh di garis diagonal & tidak menuruti arah garis diagonal (Ghozali, 2018). Grafik diatas memberikan penjelasannya menunjukkan bentuk P-P Plot disekitar garis regresi. Grafik P-P Plot diatas menunjukkan bahwa data telah memenuhi syarat dengan tersebar di garis diagonal & arah garis diagonal tersebut mengikutinya. Maka, bahwa model regresi berdistribusi wajar atau terpenuhi syarat asumsi normalitas.

Uji normalitas dilihat grafik histogram & grafik P-P Plot perlu diperkuat dengan uji statistik. Uji statistik menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil uji normalitas dengan grafik terkadang berbeda dengan hasil uji statistik. Grafik tampak normal, namun secara statistik bisa terjadi sebaliknya. Maka dari itu untuk memastikan hasil grafik berdistribusi normal, dapat dilihat dari hasil uji statistik pada tabel 4.3.

b) Analisis Statistik

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

	Nilai Sig.	Keterangan
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,065	Data berdistribusi normal

Sumber: Hasil pengolahan uji normalitas dengan SPSS 16

Setelah dilakukannya uji statistik non-parametrik satu sampel *Kolmogorov-Smirnov Test*, dihasilkannya angka *Asymp. Sig. (2-tailed)* bagi nilai residual yaitu 0,065. Hasil tersebut dapat dilihat bahwa data mempunyai distribusi normal, sebab nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05, maka model regresi ini layak digunakannya bagi analisis selanjutnya.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Tujuan uji multikolinearitas ialah bagi mendeteksi model regresi tersebut apakah ditemukannya korelasi antara variabel (x). Multikolinearitas dapat dilihat dengan angka *tolerance* dan *VIF (variance inflation factor)*, bilamana nilai *tolerance* > 0,10 & nilai *VIF* < 10, tidak termasuk gejala multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas data sampel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kepemilikan Publik	0,857	1,167
	Dewan Komisaris	0,797	1,255
	Komisaris Independen	0,929	1,077
	Komite Audit	0,763	1,311
	Profitabilitas	0,658	1,519

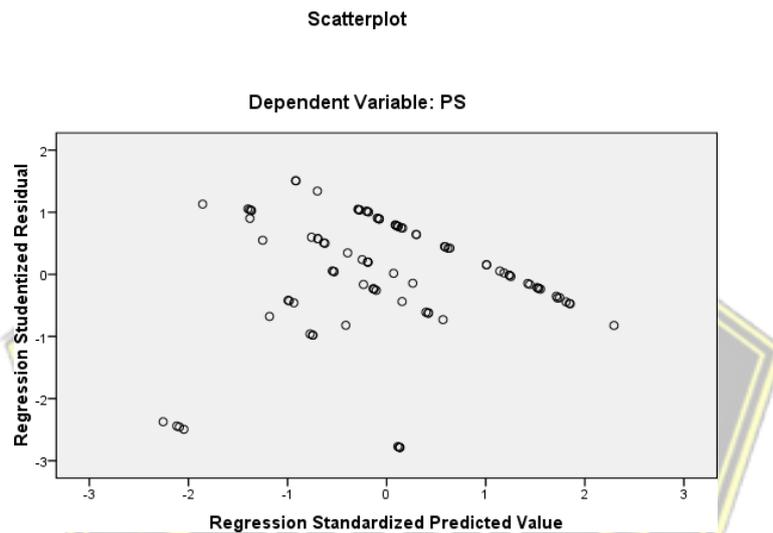
Sumber: Hasil pengolahan uji multikolinearitas dengan SPSS 16

Berdasarkan hasil dari uji ini bagi model regresi di atas, ditemukan hasil semua variabel mempunyai angka *tolerance* lebih besar 0,10 & angka *VIF* kurang dari 10. Hasil ini tidak ditemukan adanya korelasi antara variabel (y) atau bahwa semua variabel bebas

tidak memiliki masalah multikolinearitas, maka regresi ini layak digunakannya untuk analisis selanjutnya.

4.3.3 Uji Heterokedastisitas

Tujuan uji heteroskedastisitas ialah bagi mendeteksi model regresi tersebut apakah terjadi tidak sama dengan varian satu residual observasi ke observasi lainnya. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilaksanakan menggunakan grafik *scatterplot*, jika tidak membentuk pola pada titik-titik jelas tersebut & menyebar diatasnya & dibawahnya angka 0 pada sumbu Y, oleh itu tidak bertemu heteroskedastisitas. Grafik *scatterplot* dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas

Pada gambar 4.2 dapat dilihatnya bahwa plot yang membentuk tidak memiliki pola yang nyata, titik-titik tersebar acak di atasnya dan di bawahnya angka 0 pada sumbu Y, jadi ditarik kesimpulan uji tersebut tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi & dapat dilaksanakan bagi analisis berikutnya.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi mempunyai tujuan ialah bagi mendeteksi mengetahui model regresi linier apakah terjadi kolerasi kesalahan pengganggu terhadap periode t , kesalahan periode $t-1$ atau tidak?. Metode yang digunakannya bagi mendeteksi apakah terjadi suatu autokorelasi pada penelitian tersebut ialah dengan uji Durbin-Watson (DW test). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin Watson
1	0,422

Sumber: Hasil pengolahan uji autokorelasi dengan SPSS 16

Hasil dari uji autokorelasi diatas memperlihatkan bahwa angka DW (DurbinWatson) yaitu sebesar 0,422. Nilai ini akan dibandingkan dengan tabel DurbinWatson dengan total variabel (x) empat & variabel kontrol dua, seluruh sampel 96, dan derajat kepercayaan (α) 0.05, diperolehnya angka batas bawah (dL) 1,5377 & nilai batas atas (dU) 1,8023. Suatu model dinyatakan bebas autokorelasi bila nilai Durbin Watson berada diantara dU & $4-dU$. Dalam model penelitian ini angka DW lebih kecil dari dL , maka disimpulkannya bahwa terdapat autokorelasi di penelitian ini.

Cara mengatasi adanya autokorelasi, sehingga perlu dilakukannya transformasi *chochrane orcutt* terlebih dahulu dengan cari koefisien Rho. Cara *Cochrane-Orcutt* ialah salah satu cara yang dapat digunakannya untuk mengatasi *problem* autokorelasi pada regresi *OLS* (Gujarati 2003) dalam Fathurahman (2012).

Hasil dari uji autokorelasi dengan data setelah dilakukan transformasi dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini:

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi setelah transformasi

Model	Durbin Watson
1	1,855

Sumber: Hasil pengolahan uji autokorelasi dengan SPSS 16

Hasil dari uji autokorelasi diatas menunjukkan bahwa nilai DW (DurbinWatson) adalah 1,855. Angka ini akan dijadikan pembanding tabel DurbinWatson yang total variabel bebas 6, seluruh sampel 96, & derajat kepercayaan (α) 0.05, didaptkannya angka batas bawah (dL) 1,5377 & anka batas atas (dU) 1,8023. Suatu model dinyatakan terbebas dari autokorelasi, bila nilai Durbin Watson berada diantaranya dU dan 4-dU. Dalam model penelitian ini nilai DW (1,855) tepatnya diantaranya dU (1,8023) & 4-dU (2,1977), sehingga disimpulkannya tidak terjadi autokorelasi di penelitian ini.

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Cara analisis regresi linier sederhana dilaksanakan bagi mendeteksi dampak diantaranya satu variabel (x) terhadap satu variabel (y) :

Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.886	.032		27.358	.000
	Kepemilikan Publik	.055	.020	.259	2.774	.007
	Dewan Komisaris	.005	.001	.349	3.606	.001
	Komisaris Independen	.103	.025	.376	4.193	.000
	Komite Audit	-.005	.008	-.062	-.623	.535
	Profitabilitas	-.006	.008	-.080	-.754	.453

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS16

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan sebagai berikut : $Y = 0,886 + 0,55 KP + 0,005 DK + 0,103 KI - 0,005 KA UP - 0,006 PROF + e$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a. Konstanta bernilai 0,886, hal ini menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen yaitu kepemilikan publik (X1), dewan komisaris (X2), komisaris independen (X3), komite audit (X4) dan profitabilitas (X5) dianggap sama dengan konstan (0), maka besarnya Luas Pengungkapan Sukarela (Y) sama dengan besarnya konstanta yaitu sebesar 0,886.
- b. Koefisien variabel *public ownership* (b1) bernilai positif 0,055 mengartikan kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela.
- c. Koefisien regresi variabel kepemilikan publik 0,55 hal ini berarti apabila kepemilikan publik ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel bebas lainnya dianggap konstan (=0) maka akan meningkatkan nilai luas pengungkapan sukarela sebesar 0,55 satuan.
- d. Koefisien variabel dewan komisaris (b2) bernilai positif sebesar 0,005 artinya *Board of Commisioners* berdampak positif terhadap LPS. Koefisien regresi variabel DK 0,005 hal ini berarti apabila dewan komisaris ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel bebas lainnya dianggap konstan (=0) maka akan meningkatkan nilai luas pengungkapan sukarela sebesar 0,005 satuan.
- e. Koefisien variabel komisaris independen (b3) bernilai positif sebesar 0,103 artinya komisaris independen berdampak positif terhadap luas *voluntary disclosure*. Koefisien regresi variabel *Independent Commisioner* 0,103 hal ini berarti apabila komisaris independen ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel bebas lainnya dianggap konstan (=0) maka akan meningkatkan nilai luas pengungkapan sukarela sebesar 0,103 satuan.
- f. Koefisien variabel komite audit (b4) bernilai negatif sebesar -0,005 artinya *Audit Committe* berdampak negatif terhadap LPS. Koefisien regresi variabel KA -0,005 hal ini berarti apabila komite audit ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel bebas lainnya dianggap konstan (=0) maka akan menurunkan nilai luas pengungkapan sukarela sebesar -0,005 satuan.
- g. Koefisien variabel profitabilitas (b6) bernilai negatif sebesar -0,06 artinya profitabilitas berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan sukarela. Koefisien regresi variabel profitabilitas -0,06 hal ini berarti apabila proitabilitas ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel bebas lainnya dianggap konstan (=0) maka akan menurunkan nilai luas pengungkapan sukarela sebesar -0,06 satuan.

4.5 Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

Uji hipotesis dilakukannya bagi mendeteksi hipotesis tentang dampak kepemilikan publik, dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, & profitabilitas terhadap

pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Uji hipotesis ini dilakukannya dengan uji koefisien determinasi (R^2), uji dampak simultan, dan uji statistik t.

4.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) mempunyai tujuan bagi menaksir persentase jumlah tinggi variasi variabel bebas yang digunakannya dalam model dapat dijelaskannya variasi variabel terikat, tertinggal diungkapkannya oleh faktor eksternal model. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.578 ^a	.334	.289	.02597

a. Predictors: (Constant), Profitabilitas, Kepemilikan Publik, Komisaris Independen, Dewan Komisaris, Komite Audit, Profitabilitas

Berdasarkan tabel 4.8 memperlihatkan tingginya nilai *R Square* ialah 0,334, berarti bahwa 33,4% variasi pengungkapan sukarela dapat dijelaskannya variasi dari kelima variabel independen yaitu kepemilikan publik, dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan profitabilitas, sedangkan sisanya sebesar 66,6% ($100\% - 33,4\% = 66,6\%$) dijelaskan oleh faktor eksternal model.

4.5.2 Uji Statistik t

Pengujian secara t digunakannya bagi dibuktikannya H_1 sampai H_4 dan dua variabel kontrol. Dapat dilihat bab sebelumnya, hasil dari perbandingan probabilitas (*sig-t*) dengan taraf signifikan 0,05 akan dijadikannya dasar bagi pengambilan keputusan. Tabel 4.7 yang isinya hasil persamaan regresi pada variabel-variabel penelitian akan dilihat hasil dari t hitung yang dikeluarkannya oleh olah data yang keluar dengan menggunakan SPSS 16. Dari tabel tersebut terlihat angka *sig-t* bagi masing-masing variabel (x) telah diketahuinya & dapat dijadikannya sebagai dasar pengambilan keputusan dengan metode

dibandingkannya taraf signifikan 0,05.

1. Hasil uji t pada variabel kepemilikan publik (X1) mempunyai nilai t hitung (2,774) > t tabel (1,986) dan nilai probabilitas (0,007) < α (0,05). Dengan menganggap variabel lainnya konstan, hal tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela (LPS). Sehingga hipotesis pertama (H1) diterima.
2. Hasil uji t pada variabel dewan komisaris (X2) mempunyai nilai t hitung (3,606) > t tabel (1,986) dan nilai probabilitas (0,001) < α (0,05). Dengan menganggap variabel lainnya konstan, hal tersebut menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela (LPS). Sehingga hipotesis pertama (H2) diterima.
3. Hasil uji t pada variabel komisaris independen (X3) mempunyai nilai t hitung (4,193) > t tabel (1,986) dan nilai probabilitas (0,000) < α (0,05). Dengan menganggap variabel lainnya konstan, hal tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela (LPS). Sehingga hipotesis pertama (H3) diterima.
4. Hasil uji t pada variabel komite audit (X4) mempunyai nilai t hitung (- 0,623) < t tabel (1,986) dan nilai probabilitas (0,535) > α (0,05). hal tersebut memperlihatkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela (LPS). Sehingga hipotesis pertama (H4) ditolak.
5. Hasil uji t pada variabel profitabilitas (X5) mempunyai nilai t hitung (- 0,754) < t tabel (1,986) dan nilai probabilitas (0,453) > α (0,05). Dengan menganggap variabel lainnya konstan, hal tersebut memperlihatkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela (LPS).

Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil
H1	Kepemilikan publik mempunyai pengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela	Diterima
H2	Dewan komisaris mempunyai pengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela	Diterima
H3	Komisaris independen mempunyai pengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela	Diterima
H4	Komite audit mempunyai pengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela	Ditolak
H5	Profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela	Ditolak

4.5.3 Pembahasan (Interpretasi)

1. Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Luas Pengungkapan Sukarela

Berdasarkan tabel 4.7, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi kepemilikan publik sebesar 0,007 dengan koefisien 0,55 yang berarti bahwa H1 diterima. Artinya kepemilikan publik berdampak positif signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Hal ini berarti proporsi kepemilikan saham yang dimiliki publik besar, semakin banyak perusahaan mengungkapkan informasinya secara sukarela pada perusahaan manufaktur di Indonesia periode 2018 – 2021.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang digunakan oleh Fatmawati *et al.*, (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh publik dapat mendorong perusahaan menyampaikan informasi yang lebih menyeluruh pada laporan tahunan. Logika berpikir yaitu publik atau pihak eksternal perusahaan yang memiliki kepemilikan saham, memiliki harapan suatu informasi yang global mengenai perusahaan tersebut dapat ditanamkan modalnya.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Wardani (2012) yang melakukan penelitian dengan hasil bahwa variabel kepemilikan publik tidak berdampak terhadap luas pengungkapan sukarela laporan tahunan. Sedangkan penelitian yang digunakan oleh penulis

menghasilkan variabel kepemilikan publik memiliki dampak terhadap luas pengungkapan sukarela pada perusahaan manufaktur.

2. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Luas Pengungkapan Sukarela

Berdasarkan tabel 4.7, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dewan komisaris sebesar 0,001 dengan koefisien 0,005 yang berarti bahwa H2 diterima. Artinya *Board of Commissioners* berdampak positif signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Jumlah anggota dewan komisaris yang besar, maka semakin lebih efektif dalam mengawasi dan menyampaikannya secara sukarela pada perusahaan manufaktur di Indonesia periode 2018 – 2021.

Penelitian ini sama dengan penelitian yang digunakan oleh Nanda & Nahumury (2018) yang mengungkapkan bahwa mengukur anggota dewan yang jumlahnya besar dan lebih efisien dapat memungkinkan perusahaan untuk tidak didominasi oleh manajemen dalam menjalankan perannya dan lebih cenderung mengungkapkan pengungkapan yang secara sukarela. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menghasilkan variabel dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela pada perusahaan manufaktur.

3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Luas Pengungkapan Sukarela

Berdasarkan tabel 4.7, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi komisaris independen sebesar 0,000 dengan koefisien 0,103 yang berarti bahwa H3 diterima. Artinya komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Hal ini berarti semakin besar jumlah anggota Komisaris Independen, maka dalam memberikan efektifitas manajer suatu pengawas & mengungkapkannya secara sukarela pada perusahaan manufaktur di Indonesia periode 2018 – 2021.

Penelitian ini sama dengan penelitian yang digunakan oleh Poluan & Nugroho (2015) yang mengungkapkan bahwa komisaris independen dapat memberikan nasihat kepada dewan direksi yang mungkin tidak sepemikiran dengan dewan direksi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan dewan direksi untuk memilih komisaris dalam hal melakukan pengungkapan secara luas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menghasilkan variabel komisaris independen memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela pada perusahaan manufaktur.

4. Pengaruh Komite Audit terhadap Luas Pengungkapan Sukarela

Berdasarkan tabel 4.7, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi komite audit sebesar 0,535 dengan koefisien negatif -0,005 yang berarti bahwa H4 ditolak. Artinya komite audit tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Semakin besar

proporsi anggota Komite Audit, maka semakin rendah dalam tanggung jawab menjaga ketertutupan dokumen dan mengungkapkannya secara sukarela akan berkurang pada perusahaan manufaktur di Indonesia periode 2018 – 2021. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : Pengaruh Manajemen yang Lebih Kuat: Keputusan untuk melakukan pengungkapan sukarela sering kali berada di tangan manajemen puncak, bukan komite audit, yang mungkin hanya memiliki peran pengawasan. Motivasi yang Berbeda: Komite audit mungkin lebih berfokus pada mitigasi risiko pelaporan keuangan, bukan pada meningkatkan transparansi melalui *voluntary disclosure*, yang lebih terkait dengan strategi hubungan investor. Keterbatasan Wewenang: Komite audit mungkin tidak memiliki wewenang penuh untuk memutuskan aspek strategis pengungkapan, terutama jika struktur tata kelola perusahaan tidak memberikan mereka otoritas yang cukup. Faktor Lain yang Lebih Dominan: Faktor lain seperti budaya perusahaan, strategi bisnis, atau tekanan dari pemangku kepentingan eksternal mungkin lebih memengaruhi tingkat pengungkapan sukarela dibandingkan peran komite audit.

Hasil ini tetap dengan penelitian sebelumnya yang digunakan oleh Poluan & Nugroho (2015) & menurut Wijaya (2009) yang menyatakan bahwa walaupun perusahaan telah memiliki komite audit, namun bila mereka tidak mempunyai keahlian di bidang keuangan, maka kemungkinan besar mereka juga tidak akan bisa menangani kesulitan pelaporan keuangan. Dengan kata lain, keberadaan komite audit akan menjadi tidak efektif dan efisien dalam mengawasi perusahaan.

Berbeda dengan penelitian yang digunakan oleh Suwasono (2019) yang melakukan penelitian dengan hasil bahwa variabel komite audit berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Hal ini semakin meningkatnya anggota komite audit, maka luas *voluntary disclosure* yang diberikan suatu informasi oleh perusahaan kepada masyarakat akan meningkat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menghasilkan variabel komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap luas *voluntary disclosure* pada perusahaan manufaktur.

5. Pengaruh Profitabilitas terhadap Luas Pengungkapan Sukarela

Berdasarkan tabel 4.7, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi profitabilitas 0,453 dengan koefisien negatif -0,006. Artinya profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun secara teori profitabilitas berhubungan luas dengan pengungkapan sukarela, dalam praktiknya pengaruhnya bisa tidak signifikan karena adanya faktor-faktor lain yang lebih dominan

seperti kepemilikan publik, Dewan komisaris, Komisaris independen, Komite audit, ukuran perusahaan, tingkat leverage serta tata kelola perusahaan (Corporate Governance). Tidak semua perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi merasa perlu meningkatkan pengungkapan sukarela, pengungkapan informasi lebih sering didorong oleh regulasi, tekanan pasar, atau kebutuhan investor daripada sekedar tingkat profitabilitas. Semakin rendah nilai ROA, maka menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin tidak bagus di dalam suatu perusahaan manufaktur di Indonesia periode 2018 – 2021. Hal – Hal lain yang menyebabkan adalah : Motivasi Pengungkapan yang Beragam: Perusahaan yang lebih mengutamakan reputasi, hubungan dengan investor, atau kepatuhan sosial mungkin lebih cenderung melakukan pengungkapan sukarela, terlepas dari tingkat profitabilitasnya. Manajemen Risiko dan Privasi: Perusahaan yang sangat menguntungkan mungkin lebih berhati-hati untuk tidak mengungkapkan terlalu banyak informasi untuk menghindari perhatian berlebih dari pesaing atau regulator, yang bisa mengganggu keunggulan kompetitifnya. Tekanan dari Pemangku Kepentingan: Tekanan untuk melakukan pengungkapan sukarela mungkin lebih kuat pada perusahaan dengan pemangku kepentingan yang lebih beragam atau investor institusional yang menuntut transparansi, terlepas dari profitabilitasnya. Stabilitas Finansial Bukan Satu-satunya Faktor: Voluntary disclosure sering dipengaruhi oleh faktor lain, seperti tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan, atau tingkat likuiditas, yang mungkin memiliki pengaruh lebih besar daripada profitabilitas. Strategi Komunikasi yang Berbeda: Perusahaan dengan profitabilitas tinggi mungkin memilih untuk fokus pada komunikasi lain, seperti pemasaran merek atau inovasi, daripada pengungkapan sukarela dalam laporan keuangan.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang digunakan oleh Suwasono (2019) mengungkapkan bahwa profitabilitas berdampak positif terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan, yang mengungkapkan bahwa perusahaan yang mempunyai profitabilitas dengan tingkat atas maka, berani menyampaikan informasi dalam laporan tahunan secara lebih untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga mampu banyak menarik investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menghasilkan variabel profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap luas *voluntary disclosure* pada perusahaan manufaktur.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mendeteksi mengenai dampak kepemilikan publik, dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, , & profitabilitas terhadap luas pengungkapan sukarela pada perusahaan manufaktur pada tahun 2018 sampai 2021. Analisis pengaruh yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan program SPSS 16. Data sampel yang digunakannya sebanyak 24 perusahaan manufaktur yang termasuk di BEI tahun 2018 sampai 2021.

Hasil pengujian dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan berikut ini :

1. Kepemilikan publik secara signifikan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela (IPS). Artinya semakin besar proporsi jumlah kepemilikan saham publik, perusahaan mayoritas menyampaikan informasinya secara sukarela. Dengan demikian, **Kepemilikan Publik berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela didukung.**
2. Dewan komisaris secara signifikan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela (IPS). Artinya semakin besar proporsi anggota *Board of Commisioners* yang dimiliki di perusahaan manufaktur, semakin besar perusahaan dalam mengawasi perusahaan lebih ketat dan efisien serta mengungkapkan informasinya secara sukarela. Dengan demikian, **Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela didukung.**
3. Komisaris independen secara signifikan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela (IPS). Artinya semakin besar jumlah anggota komisaris independen yang dimiliki di suatu perusahaan, semakin besar perusahaan dalam memberikan tingkat pengawasan operasional manajer dan mengungkapkan informasinya secara sukarela. Dengan demikian, **Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela didukung.**
4. Komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela (IPS). Artinya semakin besar jumlah komite audit, maka tidak dapat menjamin keefektifan kinerja komite audit dalam mengawasi perusahaan terhadap pengungkapan sukarela terutama perusahaan manufaktur. Komite audit dibentuk dari suatu perusahaan hanya atas dasar untuk memnuhi regulasi yang mengibaratkan bahwa perusahaan harus membentuk komite audit dan mengungkapkan informasinya secara sukarela. **Komite Audit tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela tidak didukung.**

5. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela (IPS). Artinya tinggi rendahnya ROA yang dimiliki di suatu perusahaan manufaktur tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya perusahaan dalam mengungkapkan informasinya secara sukarela. Dengan demikian **.Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela didukung.**

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian ini kepemilikan publik, dewan komisaris, komisaris independen, mempunyai pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Hal ini bahwa dalam kepemilikan publik, setiap terjadi peningkatan dalam kepemilikan publik dapat meningkatkan luas pengungkapan sukarela. Peranan dewan komisaris sebagai bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan mempunyai dampak dalam menentukan kebijakan perusahaan. Peranan komisaris independen dalam memastikan bahwa perusahaan yang dikelola dengan bagus, maka komisaris independen mempunyai dampak positif terhadap luas pengungkapan sukarela dikarenakan komisaris independen dijadikan sebagai pengawas di dalam suatu organisasi. Jumlah komite audit mengindikasikan bahwa memiliki pengaruh negatif ini disebabkan karena kurang efektif dan efisien dalam mengawasi berbagai aspek organisasi. Profitabilitas tidak mempunyai pengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela, disebabkan laba di dalam suatu perusahaan tidak efisien dan menunjukkan kinerja perusahaan yang kurang bagus.

Adanya *good corporate governance* dalam hak kepemilikan publik, susunan struktur organisasi, penugasan & bertanggung jawab antara dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan profitabilitas, maka peran manajemen untuk melakukan pengungkapan sukarela akan meningkat.

Dengan demikian prinsip tata kelola perusahaan yang baik akan menjadi suatu sarana penelitian penting untuk membawa suatu perusahaan ke arah lebih baik dalam hal pengungkapan informasi secara sukarela, khususnya jumlah anggota komite audit, total asset di suatu perusahaan serta tinggi dan rendahnya laba yang dihasilkan.

5.3 Saran

Terdapat saran dalam penelitian ini, adalah :

Diharapkan dapat mengamati dan menambahkan variabel lainnya yang dapat berhubungan terhadap pengungkapan sukarela dalam penelitian ini, seperti : kepemilikan institusional, likuiditas, ukuran perusahaan, kinerja keuangan dan *leverage*.

5.4 Keterbatasan Penelitian

Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, adalah :

Penelitian ini hanya menggunakan daftar pengungkapan yang terdapat dalam penelitian Nuryaman (2009). Oleh Karena itu, dalam penelitian selanjutnya item pengungkapan sukarela dapat ditambahkan dari PSAK 45 atau penelitian terdahulu lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, H. E., & Oktavianna, R. 2019." Pengaruh Porsi Kepemilikan Publik, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Ukuran Kap Terhadap Pengungkapan Sukarela". *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(1), 093. <https://doi.org/10.32493/jabi.v2i1.y2019.p093-103>
- Al-Janadi, Y., Rahman, R. A., & Omar, N. H. 2013. *Corporate governance Mechanisms and Voluntary Disclosure in Saudi Arabia*. *Research Journal of Finance and Accounting*, 4. <https://doi.org/10.19030/jabr.v29i2.7657>
- Alfiana, Y. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Proporsi Dewan Komisaris, Ukuran KAP dan Ukuran Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Sukarela Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 16(1), 15–22. <https://doi.org/10.29259/jmbs.v16i1.6243>
- Arifin, H. I. 2010. *Hubungan Antara Mekanisme Good Corporate Governance Komisaris Independen , Kepemilikan Manajerial , Kepemilikan Asing , Hutang Dan Kualitas Audit) Dengan Kinerja Saham*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Choi, F. D. ., & Meek, G. K. 2010. *International Accounting*, Jakarta: Salemba Empat.
- Daat, S. C. 2017. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Kepemilikan Saham Pada Luas Pengungkapan Sukarela. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 12(1),12–23.<http://ejournal.akuntansiuncen.ac.id/index.php/JurnalAkuntansiUncen/article/view/23/17>
- Delvinur. 2015. *Pengaruh Leverage, Likuiditas, dan Proporsi Kepemilikan Saham Publik terhadap Luas Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.

Effendi, M. A. 2016. *The Power of Good Corporate Governance Theory and Implementation*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Fathurahman, M. 2012. Metode *Cochrane-Orcutt* Untuk Mengatasi Autokorelasi Pada Regresi *Ordinary Least Squares*. *Jurnal Eksponensial*, 3(1).33–38.

Fatmawati, R., Astuti, D. W., & Suhardjanto, D. 2018. Peran *Corporate Governance* dalam Meningkatkan *Voluntary Disclosure*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 57–69. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9004>

FCGI. 2001. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. II, 1–36.

Fitriana, N. L., & Prastiwi, A. (2014). Luas Pengungkapan Sukarela Dalam Annual Report. *Jurnal Akuntansi*. Vol.3 No.3

Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*.

Gunawan, A. 2019. *The Role Of Corporate Governance Mechanism On Voluntary Disclosure*. *Jurnal Akuntansi*, 23(1), 127. <https://doi.org/10.24912/ja.v23i1.467>

Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. 2002. *Culture, corporate governance and disclosure in Malaysian corporations*. *Abacus*, 38(3), 317–349.

<https://doi.org/10.1111/1467-6281.00112>

Hardiningsih, P. 2008. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Voluntary Disclosure* Laporan Tahunan Perusahaan. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 15, No.1, 67–79.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-40-2007-perseroan-terbatas>

<https://www.medcom.id/nasional/hukum/0Kv9BdRk-jiwasraya-diduga-manipulasi-laporan-keuangan>

- Huang, X., & Kang, J. K. 2017. *Geographic concentration of institutions, corporate governance, and firm value*. *Journal of Corporate Finance*, 47, 191–218. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2017.09.016>
- Indrayani, V. 2014. Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Likuiditas Terhadap Kelengkapan Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 3 No., 59–72. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Klapper, L. F., & Love, I. 2002. *Corporate governance, investor protection, and performance in emerging markets*. *Journal of Corporate Finance*, 10(5), 703–728. [https://doi.org/10.1016/S0929-1199\(03\)00046-4](https://doi.org/10.1016/S0929-1199(03)00046-4)
- Komite Nasional Kebijakan *Governance*. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Lukviarman, N. 2016. *Corporate Governance*. Solo: PT Era Adicitra Intemedia
- Mahayana, I. D. M., & Bagiada, I. M. 2015. Pengaruh Reputasi auditor dan tipe kepemilikan perusahaan pada pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol 11(1), 46–58.
- Mardika, D. 2017. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan. *Institutional repositories & scientific journals*. Skripsi. Universitas Pasundan.
- Marsudi. 2016. *Pengaruh Pengungkapan Sukarela GCG Terhadap Hubungan Antara Ukuran Dewan Komisaris, Dan Nilai Perusahaan*. 19(September), 46–57. <https://doi.org/10.31941/jebi.v19i2.424>
- Marwata. 2001. Kinerja Keuangan, Harga Saham-saham dan Pemecahan Saham. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, No. 2, 151–164.
- Mujiyono, & Nany, M. 2010. Pengaruh *Leverage*, Saham Publik, *Size* Dan Komite Audit Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 2(2), 129–134. <https://doi.org/10.15294/jda.v2i2.1936>

- Nanda, A. P., & Nahumury, J. 2018. *The Effect of Financial Performance, Board of Commissioners, Blockholder Ownership, Auditor Type and Firm Age on Voluntary Disclosure. The Indonesian Accounting Review*, 8(2), 145. <https://doi.org/10.14414/tiar.v8i2.1525>
- Nugraheni, B. D. 2012. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 16(3), 352. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2012.v16.i3.2330>
- Nuryaman, N. 2009. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Dan Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan Sukarela. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(1), 89–116. <https://doi.org/10.21002/jaki.2009.05>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK. 04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. Diakses Pada 19 Maret 2018
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.04/tahun 2016. Tugas dan Tanggung Jawab komite audit Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/POJK.04/2015. *Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.* https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-Nomor-55_POJK.04.2015.aspx. Diakses 22 Juli 2020
- Peters, G. F., & Romi, A. M. 2015. *The Association between Sustainability Governance Characteristics and the Assurance of Corporate Sustainability Reports. A Journal of Practice & Theory*, 163–198.
- Poluan, G., & Nugroho, P. I. 2015. Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Dan Kondisi *Financial Distress* Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela Dalam Laporan Tahunan Perusahaan. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, Vol.4,(No.1), pp: 39-56.

- Pradipta, D. H., & Supriyadi. 2015. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), Profitabilitas, *Leverage*, Dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Kompartemen Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol.XV(No.1), PP.1-25.
- Purwandari, A. 2012. Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Struktur Kepemilikan Dan Status Perusahaan Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Diponegoro Journal Of Accounting* Vol 1 No-2.
- Purwaty, R. 2016. *Ukuran Perusahaan, Leverage, Porsi Kepemilikan Publik, ROI Dan Ukuran KAP Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela*. Thesis, STIE Perbanas Surabaya.
- Rafifah, U. R., & Ratmono, D. 2015. *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sukarela Laporan Tahunan*. 4(3), 475–487.
- Rifai, B. 2009. Peran Komisaris Independen Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* Di Perusahaan Publik. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3), 396–412. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art5>.
- Riniati, K. 2015. *Pengaruh Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan*. 3(2), 54–67. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Safietrie, D. 2017. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai Variabel Intervening. *Institut Agama Islam Negeri Salatiga*, 1–117.
- Silaban, Y. A. P. 2015. *Faculty of economics Riau University Pekanbaru, Indonesia*. *JOM FEKON*, 1–15.
- Sugiyono, P. D. 2016. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Supomo, & Indriantoro. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Untuk Akuntansi dan Manajemen.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola

Bagi Bank Umum

Sutedi. 2012. *Good Corporate Governance*. Edisi 1. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, A. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika

Suwardjono. 2008. *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPF.

Suwasono, H. 2019. Pengaruh *Financial Distress*, *Corporate Governance* Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sukarela Pada Laporan Tahunan. *Media Akuntansi* Volume 31 No.02, Juli-Desember 2019, 31(2), 39–64. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Ujiyantho, M. A., & Agus Pramuka, B. 2007. Mekanisme *Corporate Governance*, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (studi pada perusahaan go publik sektor manufaktur). *Simposium Nasional Akuntansi X, Juli*, 1–26.

Wardani, R. P. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1). <https://doi.org/10.9744/jak.14.1.1-15>

Wiguna, P. 2013. Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Likuiditas Pada Luas Pengungkapan Sukarela. *E-Jurnal Akuntansi*, 2(1).

Wijaya, R. E. 2009. Keberadaan *Corporate Governance* Dan Kondisi *Financial Distressed* Terhadap *Voluntary Disclosure*. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 13(3), 395–404.

Wijayani, D. R., Budiman, N. A., & Mulyani, S. 2019. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Voluntary Disclosure*. *Majalah Ilmiah Solusi*, 17(4), 45–62. <https://doi.org/ISSN : 1412-5331>

Wijayanti, N. 2009. *Pengaruh Profitabilitas, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Publik Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ 45 Di Bursa Efek Indonesia)*. Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 1–83.